

KRITIK FEMINIS TERHADAP DEVELOPMENTALISME

Oleh : Lailiy Muthmainnah¹

Abstract

Feminist activists made a breakthrough of attempt in reformulating a development theory. The basic issue was breaking the binary logic on the development theory. The feminists try to place gender relation at the center of theorization. To make it more concrete, every feminist movement establish projects and programs to improve the economic and social position of women. It is seen on their program, from *Women in Development* until *Postmodern and Development*. Although every feminist movement had a different vision and mission, but we can conclude that almost every critic to development have a similar attention to the androcentricism of science and unfairness on the distribution on material resources that occur on the process of development.

Keywords: Feminist activists, gender relation, development.

A. Pendahuluan

Teori pembangunan atau yang lebih dikenal dengan paham developmentalisme sebagai sebuah gagasan tentang perubahan sosial sesungguhnya baru mulai dikenal pasca Perang Dunia II, yaitu dengan dikeluarkannya doktrin Truman. Dengan adanya doktrin tersebut maka mulailah terjadi polarisasi konsep antara negara maju dan terbelakang. Konsep pembangunan yang dikembangkan oleh Truman tersebut di atas sebenarnya sangat diilhami oleh semangat pencerahan (*enlightment*). Bahwa *development as progress* merupakan upaya untuk mengubah konsep fatalistik yang telah lama dianut. Karena manusia sesungguhnya dapat bergerak dari posisi *decay* menuju ke arah progress yang ditandai dengan adanya *rationality (science)*, *prosperity (economy)*, dan *liberty (kebebasan)* (Nisbet, 2004:27).

¹ Staf pengajar di Fakultas Filsafat UGM.

Upaya untuk keluar dari posisi *decay* itulah yang kemudian memunculkan apa yang disebut dengan teori modernisasi. Bahwa pembangunan kemudian dapat ditempuh lewat tahap-tahap tertentu, namun yang jelas pergerakannya akan selalu mengarah dari kondisi tradisional menuju modern (Fakih, 2001:48-49). Modernitas sendiri akan menggunakan industrialisasi sebagai motor utama penggerak pembangunan. Karena itu dukungan terhadap wilayah industri menjadi tema sentral dalam hal ini. Dan karena sejak awal laki-laki lebih didorong untuk masuk ke wilayah industri (publik) maka secara otomatis porsi perempuan yang berada di wilayah domestik menjadi kurang atau tidak bernilai dengan standar ekonomi yang ditetapkan oleh kalangan modernis. Perempuan akhirnya hanya dimasukkan dalam wilayah pinggiran (*peripheral*) dalam setiap studi yang terkait dengan pembangunan (Peet, Richard dan Elaine Hartwick, 1999:173).

B. Posisi Teoritik Feminisme dalam Studi Developmentalisme

Teori modernisasi sesungguhnya beragam, namun pada umumnya mereka meyakini satu hal bahwa faktor manusia dan bukan struktur/sistem yang menjadi faktor utama dalam perkembangan sebuah negara. Maka *development* (dengan mengambil konsepsi WW. Rostow) kemudian dimaknai sebagai proses evolusi perjalanan dari tradisional menuju modern melalui tahapan-tahapan tertentu atau yang dikenal dengan *the five stage scheme*. Karena itu konsep pembangunan di sini lebih dimaknai sebagai upaya untuk mencapai kondisi *betterment (lebih baik) dan prosperity (lebih makmur)* (Preston, 1986:86-88).

Dalam perkembangannya konsep pembangunan ala modernis menjadi sangat dominan. Kesuksesan teori modernis di negara asalnya kemudian coba ditiru oleh banyak negara, utamanya negara-negara dunia ketiga yang masih baru terbentuk pasca PD II. Upaya imitasi ini bertujuan untuk membawa negara-negara baru tersebut keluar dari kondisi keterbelakangan mereka, untuk kemudian bergerak menjadi negara yang mapan dari sisi perekonomiannya (Mosse, 2007:12). Namun sayangnya upaya imitasi ini tidak berjalan mulus. Kalau teori modernisasi tadi begitu sukses di negara asalnya, namun tidak di negara-negara baru tadi. Berbagai persoalan justru muncul dengan pengadopsian secara latah teori pembangunan ala modernis tadi. Ketika mereka berupaya mengejar kemajuan seperti yang dicontohkan oleh pengusung teori modernis

sebelumnya, yang terjadi pada negara-negara tersebut justru keterbelakangan. Hal inilah yang kemudian memunculkan teori dependensia, yang sesungguhnya merupakan kritik pertama terhadap pola-pola pembangunan developmentalis yang bercorak modernis tadi.

Teori dependensia sesungguhnya sangat dipengaruhi oleh gaya berpikir ala Marxian, terutama tentang konsep historis materialisnya. Bahwa faktor utama yang menyebabkan keterbelakangan sebuah negara bukanlah dari faktor internal negara yang bersangkutan, melainkan faktor eksternal, yaitu struktur dan sistem dunia yang telah menghegemoni dan begitu represif. Hal inilah yang menyebabkan mereka tidak dapat berkembang dan maju. Ini berarti ketika negara-negara dunia ketiga mencoba mengadopsi pola pembangunan seperti yang digunakan di Barat, dengan standar dari Barat, dan dukungan para ahli serta dana dari negara Barat juga, maka kondisi yang mereka dapati justru keterbelakangan. Ketergantunganlah yang menyebabkan negara-negara tersebut menjadi semakin terbelakang. Negara-negara tadi tidak lagi memiliki *bargaining power* terhadap negara-negara Barat tadi. Akibatnya kemajuan yang mereka harapkan tidak pernah tercapai.

Dari paparan di atas dapat dilihat bahwa meskipun secara strategis bisa dikatakan dua teori di atas berseberangan, namun sesungguhnya teori dependensia tidak berbeda dengan teori modernisasi dalam hal tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan, yaitu sebuah kondisi ke arah progress. Hanya jika modernisasi memandang progress adalah sesuatu yang mungkin dicapai maka dependensia memandang hal ini secara pesimis, karena justru dari proses pembangunan tersebut yang diperoleh negara-negara baru tersebut adalah keterbelakangan. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya yang dipersoalkan dalam dua teori di atas masih berkisar pada masalah strategi semata dan belum sampai pada tataran wacana atau konsep pembangunan itu sendiri.

Dalam perkembangannya terjadilah pergeseran tentang hal tersebut di atas, bahwa perdebatan tentang pembangunan tidak lagi hanya pada persoalan strategi semata melainkan sudah masuk pada masalah konsep/wacana pembangunan itu sendiri. Pada masa pergeseran inilah kemudian muncul banyak kritik atas gagasan pembangunan yang dikembangkan selama ini, diantaranya adalah kritik yang dikemukakan oleh kalangan feminis.

Feminisme seringkali didefinisikan sebagai kumpulan pemikiran, pendirian, dan aksi yang berangkat dari kesadaran, asumsi, dan kepedulian terhadap ketidakadilan, ketidaksetaraan, penindasan, atau diskriminasi terhadap kaum perempuan, serta merupakan gerakan yang berusaha untuk menghentikan segala bentuk ketidakadilan dan diskriminasi yang menimpa satu jenis kelamin tertentu. Feminisme dalam perkembangannya juga merumuskan suatu visi tentang masyarakat yang adil, demokratis, dan sejahtera serta bagaimana mencapai kondisi tersebut (Fakih, 2001:145).

Feminisme itu sendiri dalam perkembangannya juga bukanlah sebuah gerakan yang homogen. Biasanya penggolongan tentang feminisme di samping didasarkan pada periodisasi pergerakannya, feminisme biasanya juga digolongkan berdasarkan ideologi yang dianutnya.

Berdasarkan periodisasi pergerakannya, maka feminisme terbagi ke dalam tiga gelombang, yaitu feminis gelombang pertama yang lebih menekankan pada isu-isu prinsip persamaan hak bagi perempuan (hak dalam bidang sosial, politik, ekonomi, ataupun pendidikan). Feminis gelombang kedua yang mulai muncul sekitar tahun 1960an lebih menekankan pada kontestasi masalah diskriminasi dan ketidakadilan. Serta feminis gelombang ketiga yang terjadi sekitar tahun 1990an (yaitu ketika ide-ide *post structural* dan *post modern* mulai masuk) memusatkan perhatiannya pada persoalan seputar ketidakadilan, kemiskinan, dan juga relasi gender (Peet, Richard dan Elaine Hartwick, 1999: 163).

Sedangkan bila dilihat berdasarkan ideologi yang diusungnya, maka feminisme juga terpecah-pecah ke dalam beberapa kelompok. Ada feminis liberal, sosial, radikal, ecofeminism, dan juga feminis postmodern. Bahkan menurut Rosemarie Putnam Tong (2006:x-xi) sesungguhnya masih banyak corak feminis yang lain, misalnya feminisme psikoanalisis dan gender, feminisme eksistensial, serta feminisme multikultural dan global. Namun dalam tulisan ini, tiga varian feminisme yang terakhir tadi tidak dikupas secara lebih mendalam dikarenakan lima varian feminisme yang sudah disebutkan sebelumnya sudah dianggap mampu mewakili konsepsi yang berkembang di kalangan feminis terkait dengan kritik mereka terhadap pembangunan.

Beragamnya aliran feminisme tersebut di atas membawa konsekuensi berupa beragamnya pula ideologi yang mereka bawa. Karenanya tidak mengherankan jika masing-masing kelompok fe-

minis tadi kemudian bertikai mengenai apa, mengapa, dan bagaimana diskriminasi terhadap kaum perempuan itu terjadi, termasuk juga bagaimana visi, misi, dan cara menghentikannya. Meskipun demikian, sebagian besar dari mereka memiliki kesamaan tujuan yakni melakukan transformasi sosial menuju sistem sosial yang lebih adil, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Diakui ataupun tidak, proses pembangunan yang ada sekarang ini masih menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua di bawah laki-laki. Kalaupun perempuan sudah mulai masuk ke dalam program-program pembangunan, namun keberadaan mereka di sana masih dipandang dengan sebelah mata. Berbagai konsepsi tentang pembangunan (*developmentalism*) masih saja menempatkan perempuan sebagai objek dan bukan subjek dalam proses pembangunan yang sekarang sedang berjalan. Karena itu strategi gerakan feminis di sini akan senantiasa terarah sebagai upaya koreksi atas teori pembangunan yang masih cenderung mencerminkan bahwa pembangunan adalah wilayah/proyek laki-laki.

Adapun tulisan ini lebih diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan utama, yaitu pertama, apa sesungguhnya yang menjadi sasaran utama dari kritik feminis terhadap *developmentalisme*? Kedua, bagaimana strategi gerakan yang mereka luncurkan sebagai bentuk dari upaya kritik mereka tadi?

C. Binaritas Pola Pikir dalam Pembangunan Sebagai Kritik Utama Feminis

Feminis mengkritik bahwa semua ilmu yang ada sekarang ini sangat *androcentric*, bias laki-laki. Hal ini dikarenakan konsep keilmuan yang berkembang sekarang inipun adalah adopsi dari budaya keilmuan Barat yang sebenarnya sejak awal sangat bias laki-laki. Bisa dirunut dari awal pemikiran para filsuf seperti Descartes ataupun Spinoza yang sudah berbicara tentang rasionalitas, ternyata konsep rasionalitas inipun hanya digunakan dalam kategorisasi manusia laki-laki, sementara perempuan berada di luar wilayah ini. Begitupun ketika mereka berbicara tentang "*human ideal*" hal ini hanya diidentikkan dengan laki-laki sementara perempuan tidak termasuk di dalamnya. Dalam konsepsi pemikiran atau rasionalitas yang dikembangkan Barat kala itu, hanya laki-laki-lah yang akan berpikir secara rasional, jelas, dan terpilah (*clear and distinct*-Descartes) sedangkan perempuan hanya akan menggunakan emosi

atau perasaannya saja (Peet, Richard dan Elaine Hartwick, 1999: 170-172).

Para feminis mengklaim bahwa konsep keilmuan yang *androcentric* tersebut telah begitu mendominasi pola pikir masyarakat dan hal ini berakibat pada tersubordinasinya posisi perempuan dalam kehidupan. Kondisi ini tentunya akan sangat tidak menguntungkan bagi perempuan. Bahkan para feminis berasumsi bahwa seluruh perempuan di dunia menderita opresi yang sama hanya karena mereka perempuan. Legitimasi atas budaya patriarki pada kenyataannya telah mampu meletakkan mereka pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Cara-cara berpikir yang begitu didominasi dengan corak-corak maskulin inilah yang menjadikan perempuan menjadi semakin tersingkir dari kehidupan, termasuk juga dalam proses pembangunan.

Logika biner yang bercorak dominatif yang sejauh ini masih tetap digunakan dalam proses pembangunan telah meletakkan perempuan setingkat lebih rendah daripada laki-laki. Bahwa perempuan dengan identifikasi feminitasnya telah diberikan *stereotype* untuk bekerja di wilayah domestik yang kemudian dapat diidentifikasi sebagai wilayah periphery dalam studi pembangunan. Sementara laki-laki yang sejak awal telah diposisikan untuk keluar ke ranah publik akan selalu menempati wilayah utama (*core*) dalam proses pembangunan. Karena itu selama logika biner ini masih tetap dipertahankan dalam pola pikir masyarakat maka selama itu juga perempuan akan tetap tersingkir dari posisi subjek dalam proses pembangunan di segala bidang.

Feminis mengkritik bahwa teori modernisasi yang sangat menekankan industrialisasi misalnya hanya menggunakan logika rasionalitas laki-laki. Dalam industrialisasi laki-laki yang diasumsikan rasional kemudian didorong untuk keluar meninggalkan pekerjaan rumah dan bergerak di ranah publik, sedangkan perempuan yang dianggap tidak rasional, emosional dan terbelakang, ditempatkan di wilayah domestik (privat). Dalam modernisasi “logika biner” yang digunakan adalah bahwa “East and Women” itu identik dengan wilayah periphery dalam studi pembangunan. Itu artinya posisi perempuan di wilayah domestik (privat) dipandang lebih rendah daripada mereka (laki-laki) yang masuk ke wilayah publik (Peet, Richard dan Elaine Hartwick, 1999:173).

Kritik feminis tadi tidak hanya dialamatkan kepada teori developmentalis yang bergaya modernis, tetapi feminis juga meng-

kritik bahwa teori dependensia yang katanya merupakan oposisi dari teori modernis itupun sesungguhnya tetap menggunakan logika yang sama dengan model developmentalis yang modernis. Karena yang terjadi sebenarnya, dalam teori dependensia nasib perempuan tidaklah jauh berbeda. Pada kenyataannya teori dependensia juga bekerja dalam sebuah “logika oposisi” antara *rational sphere of social production* (yang menjadi wilayah laki-laki) dengan *private precapitalist realism* (yang menjadi wilayah perempuan). Dimana wilayah publik menjadi semacam paradigma dalam pembangunan, sementara itu struktur masyarakat pra kapitalis (yang diibaratkan dengan kondisi perempuan) tetap menjadi halangan. Yang apabila ditarik lebih jauh hal ini mirip dengan konsep logika center–peripheri (Peet, Richard dan Elaine Hartwick, 1999: 174).

Pada kenyataannya kedua teori di atas sama-sama gagal, maka pembacaan atas teori pembangunan oleh feminisme adalah dengan mempertanyakan ulang siapa sebenarnya yang menjadi “subjek” dalam proses pembangunan tersebut. Karena yang terjadi sejauh ini, ketika mulai ada dikotomi semacam maskulinitas-feminitas, modern-tradisional, *center*-peripheri, dunia I-dunia III, justru membawa ke arah terjadinya suatu “dominasi”. Sehingga titik tolak feminis sebagai sebuah perspektif di sini adalah pada masalah sensitifitas terhadap struktur kekuasaan yang hidup dan sistemik, serta memberikan kemungkinan atau peluang untuk menuliskan kembali makna pembangunan pada terma individu sebagai upaya untuk merealisasikan aspirasi mereka.

D. Strategi Gerakan Sebagai Cerminan Kritik

Sebagai upaya kritik atas binaritas pola pikir yang masih saja diadopsi dalam pola-pola pembangunan yang berjalan saat ini, maka kalangan feminis kemudian mencoba untuk melakukan interaksi secara lebih mendalam dengan studi pembangunan melalui strategi-strategi gerakannya. Upaya ini semakin nampak nyata mulai dasawarsa 1960an, yaitu ketika perhatian bangsa-bangsa di dunia mulai tertuju kepada perempuan dengan segenap keutuhan eksistensinya. Perempuan pada akhirnya mulai dimasukkan dalam studi-studi tentang pembangunan. Hanya saja perlu dipahami bahwa proses interaksi antara feminis dengan pembangunan itu sendiri sejak semula sangat *cultural specific* dan *time specific*, maka tidak

heran jika kemudian terjadi perbedaan strategi gerakan antara feminis yang satu dengan feminis yang lain.

Setidaknya ada 5 bentuk strategi gerakan feminis (Peet, 1999:179) terkait dengan kritik mereka terhadap proses pembangunan, yaitu :

1. *Women In Development* (WID) → diusung oleh feminis liberal;
2. *Women And Development* (WAD) → diusung oleh feminis sosial;
3. *Gender And Development* (GAD) → diusung oleh feminis radikal;
4. *Women, Environment, and Development* (WED) → diusung oleh ecofeminisme;
5. *Postmodern And Development* (PAD) → diusung oleh feminis posmodernis.

1. *Women in Development* (WID)

WID dikembangkan oleh para pemikir feminis liberal. Program utama yang diusung adalah *restrukturisasi pembangunan, kesejahteraan, persamaan, anti kemiskinan, serta efisiensi dan pemberdayaan*.

WID lebih merupakan kritik feminis liberal terhadap teori pembangunan ala modernis yang dikembangkan oleh kalangan liberal. WID sendiri sebenarnya menerima teori modernisasi secara umum bahwa pembangunan merupakan proses linier dari pertumbuhan ekonomi. WID juga menerima bahwa keberadaan struktur kekuasaan dan politik bekerja dalam perbaikan. Oleh karena itu WID lebih memfokuskan pada upaya untuk *mendorong partisipasi yang adil di dalam sistem yang ada dan bukan untuk mengubah sistem itu sendiri*.

Dalam pandangan Carolin Moser sebagaimana dikutip oleh Richard Peet (1999:181), setidaknya ada 5 variasi dalam WID, yaitu :

- a. Pendekatan kesejahteraan : lebih memfokuskan pada peran reproduktif perempuan yang terkait dengan persoalan-persoalan seputar populasi (*birth control*).
- b. Pendekatan keadilan : lebih memfokuskan pada resistensi perempuan atas laki-laki.

- c. Pendekatan anti kemiskinan : fokusnya adalah pada masuknya perempuan ke dunia kerja atau memperoleh akses untuk melakukan kegiatan secara ekonomi.
- d. Pendekatan efisiensi : fokusnya adalah pada partisipasi perempuan dalam restrukturisasi tatanan ekonomi baru.
- e. Pendekatan *empowerment* : fokusnya adalah pada pemberdayaan perempuan terkait dengan transformasi hukum dan struktur yang ada secara *bottom-up*.

Model-model pendekatan di atas itulah yang kemudian banyak diadopsi oleh negara-negara Selatan, termasuk diantaranya Indonesia. Pada masa Orde Baru misalnya, kebijakan yang ditempuh diantaranya adalah dengan membentuk Kementerian urusan peranan wanita, meningkatkan peran serta perempuan dalam sektor industri, menjalankan program KB, memberikan pendidikan di sektor informal, misalnya dengan program PKK. Namun sesungguhnya kebijakan-kebijakan yang dijalankan itu sendiri dalam dirinya masih bias gender (Sumijati AS, 2005:27-37).

Secara umum dapat dikatakan bahwa kelima pendekatan yang ditawarkan oleh WID sesungguhnya masih menempatkan perempuan sebagai *victim*. WID masih berkuat pada seputar perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan. Dalam asumsinya, laki-laki dan perempuan adalah sama-sama rasional, maka adalah tidak rasional ketika kemudian perempuan diperlakukan tidak adil hanya karena mereka perempuan. Contoh misalnya, perempuan memperoleh upah yang jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki hanya karena pertimbangan perbedaan jenis kelamin. Atau misalnya dalam rekrutmen tenaga kerja maka laki-laki dan perempuan harus diberi porsi yang sama, jangan hanya karena alasan “dia perempuan” maka perempuan sudah tersingkir lebih dahulu sebelum bersaing.

Karena itu banyak kalangan menunjukkan betapa WID ini memiliki banyak kelemahan, di antaranya adalah mengabaikan aspek gender, ketidakadilan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan, serta nilai-nilai yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu WID juga mengabaikan faktor kelas, ras, ataupun budaya.

Ketika WID menawarkan solusi melalui peran ganda perempuan yang ditempuh dengan masuknya perempuan ke dalam proses industrialisasi, WID sendiri tidak bisa menjelaskan atau me-

nawarkan strategi yang mampu mereduksi beban berat dalam rumah tangga misalnya, sehingga yang kemudian terjadi justru *double burden* bagi perempuan. Hal ini dapat dipahami sebab pendekatan-pendekatan yang ditawarkan oleh WID cenderung *kompromistis dan tidak konfrontatif*. Sekali lagi yang menjadi fokus WID adalah “*poverty*” dan bukan “*opresi*” dengan mengabaikan subordinasi dan opresi yang mungkin terjadi pada diri perempuan. Sehingga walaupun terjadi kemiskinan pada perempuan, hal itu bukan disebabkan oleh adanya tekanan dari laki-laki. Maka solusi yang ditawarkan untuk menghentikan marginalisasi terhadap perempuan tersebut adalah dengan memperjuangkan hukum dan peraturan yang memungkinkan kaum perempuan memiliki akses dan kontrol yang sama pada pekerjaan dan imbalan ekonomi.

2. Women And Development (WAD)

Pemikiran WAD berakar dari gagasan feminis sosialis tentang pembangunan. WAD sendiri banyak mengadopsi teori marxis dan neo-marxis (*dependencia*) yang menyebabkan timbulnya keterbelakangan. Sehingga isu yang diangkat dalam WAD adalah *patriarkhi, intensifikasi patriarkhi, kapitalisme, dan private property* (Peet, 1999:183).

Bisa dikatakan bahwa sebenarnya ada konflik terselubung antara kebutuhan kesadaran feminis di satu pihak dengan kebutuhan untuk menjaga integritas materialisme pada pihak lain, sehingga analisis *patriarkhi* (kekuasaan laki-laki/ayah dalam rumah tangga) harus ditambahkan dalam analisis *mode of production*.

WAD memfokuskan pada relasi antara laki-laki dan perempuan. Perempuan sesungguhnya selalu memainkan peranan penting ekonomi dalam masyarakat mereka, sebagai aktor produktif maupun reproduktif, namun ketika terbuka kapitalisme global maka mulailah terjadi opresi dan marginalisasi, misalnya tenaga kerja perempuan yang sangat murah di tangan MNC/TNC.

Patriarchal division of labour yang didasarkan pada pembagian secara struktural dan subordinasi manusia yang satu terhadap manusia yang lain, laki-laki atas perempuan, asing atas lokal, bahkan lebih jauh *science and technology* hanya menjadi kuasa laki-laki. Bias *stereotype* atas *division of labour* ini kemudian terus menerus disosialisasikan lewat pendidikan ataupun media massa, akibatnya pola pikir terbentuk.

Oleh karena itu kritik terhadap kapitalisme haruslah disertai dengan kritik dominasi terhadap perempuan (dialektika struktur kelas kapitalis–struktur hierarki seksual). Analisis patriarki ini harus dimasukkan dalam *analisis mode of production* karena, keterlibatan perempuan dalam sektor publik ketika tidak disertai dengan adanya perubahan norma kultural dalam rumah tangga maka justru akan menimbulkan adanya beban ganda untuk diri perempuan daripada menaikkan status atau kekuasaan mereka. Perempuan akibatnya akan menjadi budak dari sistem tersebut.

Ketidakadilan dalam pandangan ini bermula bukan dari perbedaan biologis yang ada pada diri laki-laki dan perempuan melainkan lebih karena penilaian dan anggapan terhadap perbedaan itu. Dalam hal ini penyebab penindasan tidak melulu kegiatan produksi atau reproduksi melainkan juga konstruksi sosial dari kedua kegiatan tersebut.

3. Gender And Development (GAD)

GAD menggunakan analisis gender dalam menguraikan problem perempuan dalam pembangunan. GAD melihat bahwa perempuan bukanlah kelompok yang otonom tetapi mereka terbagi ke dalam kelas, ras, dan keyakinan. Peranan perempuan dalam masyarakat juga tidak dapat dilihat sebagai otonom melainkan sudah terbentuk lewat internalisasi gender. Pendekatan ini meletakkan persoalannya bukan pada perempuannya, melainkan pada ideologi atau keyakinan yang dianut oleh laki-laki dan perempuan tersebut yang kemudian akan sangat berpengaruh pada kebijakan dan pelaksanaan pembangunan. Akibat kebijakan pembangunan yang buta gender mengakibatkan dampak yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan.

Analisis gender memusatkan pada ketidakadilan struktural yang disebabkan oleh keyakinan gender yang mengakar dan tersembunyi di berbagai tempat, seperti tradisi masyarakat, keyakinan agama, serta kebijakan dan perencanaan pembangunan. Akibat bias gender maka jutaan perempuan secara tidak sengaja telah menjadi korban atau dikorbankan dalam proyek pembangunan tersebut. Sulitnya adalah bias gender ini seringkali tidak disadari oleh pelakunya, para perencana dan pelaksana program tidak pernah merasa dan menyadari bahwa mereka telah mendiskriminasi kaum perempuan.

Perbedaan gender akan melahirkan peran gender. Tetapi sayangnya, peran gender tradisional selama ini menempatkan perempuan pada posisi yang subordinat dan menyebabkan ketidakadilan. Manifestasi dari ketidakadilan itu adalah terjadinya : *marjinalisasi, subordinasi, stereotype, violence, dan burden* (Peet, 1999:187). Peran gender yang sudah terinternalisasi secara lama kemudian seolah-olah dianggap sebagai kodrat. Lambat laun terciptalah ketidakadilan gender yang itu sudah diterima dan dipandang bukan sebagai sesuatu yang salah.

Tidak seperti WID ataupun WAD, GAD melihat negara adalah sebagai aktor penting yang akan mempromosikan emansipasi perempuan. Strategi yang ditempuh kemudian adalah *institusionalisasi gender* dalam kebijakan negara dan perubahan sosial. GAD dalam hal ini akan berbicara lebih jauh tentang persoalan struktur sosial, politik, ekonomi yang melingkupi. Tujuan GAD adalah melakukan suatu transformasi sosial atas struktur gender yang tidak adil sekarang ini.

4. *Women, Environment, and Development (WED)*

WED dikembangkan dari paham ecofeminisme. Dalam asumsinya kebanyakan teori-teori feminis yang ada sebelumnya terlalu mengunggulkan prinsip maskulinitas sebagai upaya menyelesaikan masalah yang ada. Hal ini tanpa disadari telah mengabaikan unsur feminitas sendiri. Dalam asumsi ecofeminisme, bumi dan alam dipandang dalam prinsip feminin. Karena itu ada keterkaitan atau hubungan yang paralel antara kontrol laki-laki atas perempuan dengan kontrol laki-laki atas alam. Merajalelanya prinsip maskulinitas yang anti *nature* mengakibatkan semakin meningkatnya tindak kekerasan terhadap kaum miskin perempuan dan juga semakin tingginya tingkat kerusakan alam. Ecofeminisme memandang maskulinitas dan feminitas sebagai dua prinsip yang kontradiktif. Dimana feminitas digambarkan berciri kedamaian, keselamatan, dan kebersamaan. Sementara maskulinitas bercirikan persaingan, dominasi, eksploitasi, dan penindasan (Peet, 1999:188).

Pola-pola berpikir ala Barat yang begitu didominasi oleh prinsip maskulinitas dan tidak sensitif gender ini tidak hanya telah mengakibatkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan, tetapi juga hancurnya lingkungan, sistem pengetahuan non rasionalisme, dan banyak persoalan dunia dewasa ini. Maka agenda ecofeminisme adalah advokasi terhadap prinsip-prinsip feminitas tersebut.

Terkait dengan kritiknya terhadap pembangunan maka eco-feminisme lebih menekankan pada persoalan bagaimana agar dalam pengelolaan sumber daya alam lebih menekankan unsur feminitas agar kerusakan dapat dikurangi dan pembangunan yang berkelanjutan dapat terwujud. Pengelolaan atas sumber daya yang ada dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan kebutuhan lingkungan, konservasi sumber daya yang tidak dapat diperbarui, serta yang tidak kalah pentingnya adalah menurunkan sampah dan polusi akibat industri. Pola-pola pembangunan yang telah dilakukan selama ini, meniru Barat yang bercorak dominan maskulin telah menyebabkan semakin turunnya kualitas alam.

5. Postmodern and Development (PAD)

Perspektif PAD sesungguhnya merupakan reaksi terhadap perspektif sebelumnya, yaitu GAD maupun WID. Menurut PAD, sudut pandang yang digunakan oleh GAD masih memandang perempuan sebagai *the others* atau dalam kasus WID adalah senantiasa menggunakan tiga *image* untuk perempuan, yaitu perempuan sebagai *victim*, perempuan sebagai objek seksual, serta perempuan sebagai makhluk yang terpisah (posisinya subordinat). Kalangan feminis posmodernis berasumsi bahwa sesungguhnya sudut pandang WID tadi masih sangat tertanam dengan wacana-wacana kolonial/neo-kolonial dan juga wacana liberal tentang pasar, yang keduanya sesungguhnya tidak mampu memberdayakan perempuan.

Kritik feminis posmodernis yang lain adalah masalah pengetahuan (episteme) yang berkembang dalam dunia modern. Bahwa pengetahuan yang berkembang sekarang sesungguhnya sangat *Eurocentric*, sehingga justru mematikan pengetahuan-pengetahuan lokal. Dalam pandangan feminis posmodernis pengetahuan yang semacam itu harus didekonstruksi. Sebagai contoh, misalnya konsep tentang *expert* atau yang ahli. Mereka yang dikatakan *expert* adalah mereka yang memiliki pengetahuan teknis dari negara modern. Mereka inilah yang kemudian dikonstruksi akan mampu menyelesaikan seluruh problem yang ada di negara berkembang, termasuk problem pembangunan. Padahal menurut Parpart (1995) hal ini sesungguhnya merupakan konstruksi Barat.

Feminis posmodernis sendiri sesungguhnya tidak menolak sama sekali pembangunan. Namun yang lebih menjadi titik tekan feminis posmodernis terkait dengan proses pembangunan adalah menerima perbedaan dan perdebatan kekuasaan, membantu mem-

buka dialog yang nantinya akan mampu memberdayakan perempuan untuk mengartikulasikan kebutuhan dan agenda mereka sendiri. Sehingga esensi dari posmodernisme dan pembangunan adalah pada “perbedaan” tadi. Meskipun mereka (laki-laki-perempuan) berbeda namun tetap harus diperlakukan sama, tidak boleh ada pihak yang kemudian mendominasi. Tidak boleh kemudian ada cara berpikir tunggal yang kemudian diadopsi menjadi sebuah doktrin kebenaran, karena jika hal ini dilakukan yang terjadi kemudian justru dominasi satu pihak atas pihak lain. Pola-pola pikir Barat yang menggunakan logika oposisi seperti perempuan–laki-laki, tradisional-modern, peripheri-center, dunia III–dunia I, terbelakang–modern, pada kenyataannya justru telah menimbulkan eksploitasi, hierarki, dan dominasi. Sehingga tekanan postmodern adalah lebih kepada perubahan pola pikir yang sensitif gender dan tidak sekedar persoalan perbedaan jenis kelamin lagi (Peet, 1999:191).

E. Spirit Utama Dari Seluruh Strategi Gerakan

Dari berbagai paparan di atas, maka dapat dikatakan bahwa sesungguhnya gerak feminisme secara garis besar dapat dikatakan senantiasa berkisar pada dua hal utama, yaitu (1) kurang sempurnanya distribusi keuntungan material dan ketidakadilan atas kontrol sumber daya produktif, (2) menyerang androcentrisme ilmu dan nilai yang didasarkan pada budaya Barat (Peet, 1999:192). Dua hal ini sekaligus merupakan titik temu atau inter-relasi yang ada dari beragam aliran feminis yang ada. Karena meskipun strategi gerakan yang mereka luncurkan berbeda-beda, namun sesungguhnya tetap dua hal tersebut di atas yang menjadi sasaran utama dari gerakan mereka.

Di balik itu semua, apa yang dilakukan oleh feminis sesungguhnya adalah sebuah sudut pandang baru dalam memahami dunia ini. Pada pandangan pertamanya, feminisme melihat bahwa proses pembangunan yang berjalan selama ini dan dianggap sebagai sebuah normalitas, maka oleh feminisme hal ini dipandang sebagai abnormalitas, apa yang diasumsikan adil selama ini oleh feminisme ini dipandang sebagai sesuatu yang tidak adil, dan apa yang dianggap patut dipuji selama ini justru oleh feminisme dipandang sebagai sesuatu yang menjijikkan dan tidak pantas untuk dipuji. Pada tingkatan ini kritik feminisme bertitik tolak pada upaya untuk *membalik apa yang menjadi trend dominan*, feminisme jus-

tru bergerak pada upaya anti tesis, melihat sesuatu dari kebalikannya.

Karena itu gagasan-gagasan feminisme yang dituangkan dari WID sampai PAD sebenarnya merupakan poin teoritis yang diturunkan dari pemikiran bahwa pengalaman kelompok individu dan kesejarahan mereka jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Barat. Pengalaman yang berbeda-beda inipun kemudian dituangkan dalam bentuk program yang berbeda atau bahkan saling bertentangan. Masing-masing feminis bergerak untuk melakukan *counter argument* atas apa yang dikemukakan oleh feminis lainnya. Namun itu semua akan membentuk tatanan yang lebih toleran dalam sebuah *global feminism*.

F. Penutup

Hal utama yang harus dilakukan dalam proses pembangunan sesungguhnya adalah kesadaran dalam kerangka pikir untuk mewujudkan citra atau *image* masyarakat yang hendak dicapai. Di mana citra atau *image* masyarakat tersebut sangat *cultural specific and time specific*. Pola pembangunan tidak bisa dilakukan dengan mengadopsi begitu saja pola-pola pembangunan dari negara lain yang sudah dianggap berhasil dengan tanpa dilakukan penyesuaian-penyesuaian tertentu. Sebab seperti dikemukakan tadi bahwa pola pembangunan sesungguhnya sangat *cultural specific and time specific*.

Mengadopsi begitu saja sudah merupakan sebuah kesalahan fatal apalagi jika sesungguhnya dalam pola pembangunan yang hendak ditiru tadi sudah tersirat kondisi yang bias (tidak adil) terhadap pihak-pihak tertentu yang sesungguhnya juga memiliki kepentingan yang sama dengan yang lain. Di sinilah sesungguhnya gerakan feminisme muncul dan memainkan perannya. Bahwa upaya mereka adalah untuk membongkar kembali siapa sesungguhnya yang menjadi subjek dalam pembangunan selama ini. Dan kenapa perempuan senantiasa tersingkir atau kalaupun masuk hanya diakui sebagai wilayah peripheral dalam proses pembangunan.

Dari apa yang telah diuraikan pada sub-sub bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya yang menjadi sasaran utama kritik dari feminis terhadap developmentalisme adalah logika berpikir biner yang ada di dalam konsep pembangunan tersebut. Bahwa kategorisasi maskulinitas dan feminitas yang kemudian ditarik ke lebih jauh ke dalam wilayah

center-periphery, maju-terbelakang, ataupun dunia I dan dunia III dalam studi pembangunan, ternyata telah berhasil menempatkan perempuan berada satu taraf lebih rendah daripada laki-laki. Karena kemudian perempuan senantiasa diidentikkan dengan wilayah perifer dalam studi-studi pembangunan.

Logika berpikir biner ini-lah sesungguhnya yang hendak dihapuskan oleh kalangan feminis lewat strategi-strategi gerakan mereka mulai dari WID, WAD, GAD, WED, sampai dengan PAD. Meskipun tidak jarang antar gerakan feminis itu sendiri saling terjadi friksi, namun pada dasarnya mereka memiliki kesatuan spirit yaitu menciptakan tatanan dunia yang lebih netral gender, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

-JF-

Daftar Pustaka

- Bakker, Anton, 1990, *Metode Penelitian Filsafat*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Fakih, Mansour, 2001, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, kerjasama antara Insist Press dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Krismantoro, Lilik, 2007, "Refleksi Menuju Era Pasca Pembangunan" dalam Kompas TEROKA Sabtu tanggal 27 September 2007.
- Mosse, Julia Cleves, 2007, *Gender dan Pembangunan*, Kerjasama Rifka Annisa Women Crisis Center dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mustaqim, Muhammad, 2007, "Globalisasi dan Seri Penjajahan Baru" dalam <http://paradigmaonline.wordpress.com/majalah-paradigma-edisi-11/artikel-utama/>.
- Nisbet, Robert. A., 1979/2004, *The Idea of Progress*, The Online Library of Liberty, Liberty Fund Inc., tersedia online di <http://oll.libertyfund.org/Essays?Bibliographical/Nisbet0190/Progress.html#1f-essay004lev2sec01>
- Peet, Richard dan Elaine Hartwick, 1999, *Theories of Development*, The Guilford Press, New York, Chapter. 6. *Feminist Theories of Development*.
- Preston, P.W., 1986, *Making Sense of Development*, Routledge, London.

- Sumijati AS dan Almira Rianty, 2005, “Gender, Orde Baru, dan Kesejahteraan : Menapak Jejak Perempuan dalam Program Pembangunan” dalam *Bulak Sumur Menggagas Negara Sejahtera Sebuah Pemikiran Awal*, Badan Penerbitan Fakultas Filsafat UGM bekerjasama dengan Panitia Dies Natalis UGM ke-56, Yogyakarta.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 2007, *Pembangunan : Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tong, Rosemarie Putnam, 2006, *Feminist Thought : A More Comprehensive Introduction 2nd edition (terj)*, Jalasutra, Yogyakarta.